

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Deson Wanimbo (wanimbodeson@gmail.com)^{1*}, Otniel Safkaur (otnielsafkaure@gmail.com)²,
Juliana Waromi (julianawaromi77@gmail.com)³, Jhon Blesia (Jhonblesia7@gmail.com)⁴,
Maylend Kambuaya (kjayapura@yahoo.com)⁵, Aaron Simanjuntak
(aaron simanjuntak@gmail.com)⁶, Bill Pangayow (billpangayow@gmail.com)⁷

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

**Corresponding Author*

Abstract

This study aims to determine the effect of Human Resource Competence and the Government's Internal Control System on the Quality of Financial Reports of the Regional Government of Tolikara Regency. The sample in this study was taken using the saturated sample method. Questionnaires that can be further processed are 30 questionnaires. Hypotheses were analyzed using statistical methods with the help of SPSS software. The results of this study are that the Competence of Human Resources and the Government's Internal Control System have a positive effect on the Quality of the Financial Statements of the Regional Government of Tolikara Regency where there is a large influence of the two independent variables on the quality of the government's financial reports amounting to 80.9%.

This study recommends that a comprehensive education and training program be held to improve HR competence in improving the quality of local government financial reports, in addition to that top management must support the implementation of the Government Internal Control System so that the quality improvement of regional financial reports is more optimal.

Keywords: *Quality of financial reports; HR competence; SPIP*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode sampel jenuh. Kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut sebanyak 30 kuesioner. Hipotesis dianalisis menggunakan metode statistik dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara dimana terdapat besarnya pengaruh kedua variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 80,9%.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu diadakan program Pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, selain itu manajemen puncak harus mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar peningkatan kualitas laporan keuangan daerah lebih optimal.

Kata Kunci: Kualitas Laporan keuangan; kompetensi SDM; SPIP

Pendahuluan

Dewasa ini transparansi dan akuntabilitas merupakan upaya penting yang dilakukan untuk mewujudkan *good governance* dan *clear governance* sebagai salah satu perwujudan reformasi. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai (Kirana 2003:3), sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi dan akuntabilitas juga tidak terlepas dari bagaimana organisasi pemerintahan mampu untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintah daerah itu sesuai Kerangka Konseptual PP No. 71 tahun 2010 paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 menyoroti bahwa setiap entitas pelapor mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan antargenerasi, Evaluasi kerja.

PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK-RI bahwa Propinsi Papua pada umumnya sudah memiliki opini audit yang baik, namun ada beberapa kabupaten memiliki opini audit yang belum baik. Berdasarkan hasil audit BPK-RI bahwa Kabupaten Tolikara di tahun 2019 - 2020 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK-RI merekomendasikan temuan audit yang perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain yaitu adanya beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian internal dalam pelaporan seperti bendahara belum memahami tugas dan tanggungjawab, kurangnya pengawasan yang melekat dari pimpinan langsung terhadap Bendahara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang mentaati Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan afektasinya, Teguran yang disampaikan kepada pengguna anggaran

tidak ditanggapi secara serius, pengetahuan bendahara dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masih kurang pemahaman dikarenakan adanya keterlambatan informasi mengenai peraturan pengelolaan keuangan daerah. Temuan lainnya yaitu kurangnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten (BPK RI, 2020)

Dapat dijelaskan bahwa hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Tolikara terutama dalam mencapai target belanja daerah, adalah belum memahami tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara, kurangnya pengawasan melekat dari atasan langsung Bendahara, Kepala SKPD/OPD kurang mentaati dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Adanya penggunaan dana tidak sesuai dengan afektasinya, teguran yang disampaikan kepada pengguna anggaran tidak ditanggapi secara serius, Pengetahuan Bendahara dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masih kurang dan terlambatnya informasi mengenai peraturan pengelolaan keuangan maupun surat yang ditujukan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Tolikara yang dalam hal ini adalah jajaran eksekutif dan legislatif, bertekad untuk senantiasa meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga akan dapat disajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar, sesuai dengan kondisi nyata keuangan Daerah. Untuk itulah diperlukan strategi dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dilakukan dengan cara: (1) Meningkatkan kuitas sumber daya manusia yang terkait dnegan pengelolaan keuangan daerah, berupa pendidikan formal, pelatihan dan kursus-kursus bidang keuangan daerah. (2) Memelihara pencatatan yang terkait dengan aset milik daerah, (3) menindaklanjuti segala rekomendasi yang konstruktif dari auditor independen, dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya dilakukan oleh Nurillah (2014) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah maka akan menyebabkan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dihasilkan.

Hasil penelitian Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014) juga telah melakukan penelitian terkait kualitas laporan keuangan telah membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan daerah. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudiarta (2015) menghasilkan hipotesis bahwa kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai informasi

pelaporan keuangan entitas akuntansi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

Perbedaan hasil penelitian dan masih banyaknya organisasi pemerintahan yang belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pendorong dan daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Rumusan masalah yaitu apakah kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan uji secara parsial maupun simultan. bertujuan menganalisis pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian intern terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kajian Pustaka

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan. Menurut peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Sedangkan menurut Bastian (2010, h; 9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Mahmudi (2011, h; 143) laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Dari pengertian-pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan yaitu suatu proses akuntansi yang berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dalam suatu periode akuntansi, laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah sebagai berikut: (1) untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*). (2) untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan dan menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan suatu keputusan dan berguna untuk kelangsungan suatu entitas atau suatu pemerintahan daerah.

Definisi kualitas menurut Mulyana, (2010) dalam susilawati dan riana, (2014) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi.

Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, berupa keterampilan dan pengetahuan khusus, sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (keputusan Kepala BKN No 46 Tahun 2007).

Arens et al (2012:290) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen dengan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasaran, dimana kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara bersama, mereka membuat pengendalian internal entitas. Apabila tingkat keberhasilan perusahaan dikaitkan dengan tujuannya dan dikaitkan sebagai ukuran dari output, maka itu yang disebut dengan efektivitas. Maka, efektivitas pengendalian internal dapat dijadikan ukuran melihat sejauh mana suatu sistem mencapai tujuannya (Stair & Reynolds, (2010:8).

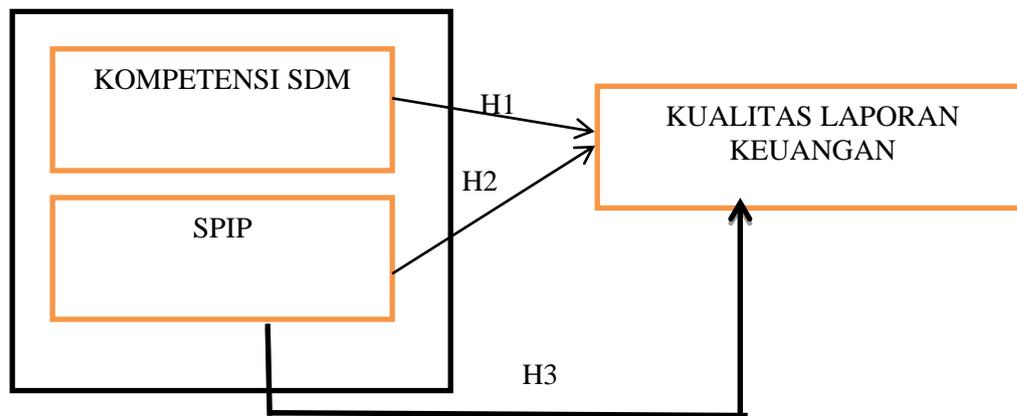
Sistem pengendalian intern untuk Pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mendefinisikan sistem pengendalian intern pemerintah adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan sistem pengendalian intern menurut COSO (2013) adalah; (1) *efficiency and effectiveness of operations*, (2) *reliability of financial reporting*, (3) *compliance with applicable laws and regulations*.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2008 berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan tolok ukur efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan yaitu untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan terhadap Asset Negara, keterandalan laporan keuangan dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku.

Kerangka Pemikiran

Kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini pemahaman akuntansi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah baik diharapkan akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Artikel ini menemukan pengaruh kompetensi sumber daya manusia (pemahaman akuntansi) dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tolikara.

Guna mengetahui keterkaitan hubungan masing – masing variabel maka kerangka pemikiran dapat ditunjukkan dengan pola berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan : ————— : Parsial

————— : Simultan

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat penjelasan dan studi kausal. Objek penelitian yaitu penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual, kompetensi aparatur bidang keuangan dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data berupa hasil penyebaran kuesioner pada responden yang dituju. populasi penelitian adalah 30 OPD Kabupaten Tolikara. Sampel yang digunakan yaitu seluruh anggota 30 populasi. Teknik penentuan sampel menggunakan sampel jenuh (sensus). Informasi akan dikumpulkan yaitu PPK SKPD dan Bendahara dan Inspektorat pada OPD di Pemerintah Kabupaten Tolikara.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (Mudrajad, 2003:124), sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber yang tersedia (Sekaran dan Bougie, 2010:180).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian dengan mengukur koefisien *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Sujarweni, 2014). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Pearson Correlation Pengujian Variabel

o.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
	Sumber Daya Manusia	0.767	Reliabel
	Sistem Pengendalian Internal	0.926	Reliabel
	Kualitas Laporan Keuangan	0.938	Reliabel

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Data diatas menunjukkan bahwa uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang mana mencerminkan kualitas indikator dan variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pernyataan selalu konsisten. Dimana untuk seluruh tingkatan variabel dan juga indikator mendapatkan nilai koefisien "Alpha Cronbach" lebih besar dari 0,600, yang berarti hasil tabulasi data primer dari lapangan dalam penelitian ini dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.2
Hasil Uji Koefisien Determinan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.899 ^a	.809	.795	3.78968

a. Predictors: (Constant), spi2, sdm2

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari hasil Uji Determinan R² pada tabel diatas, diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0.809 atau 80,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah dapat dijelaskan melalui Kompetensi sumber daya manusia dan system pengendalian intern pemerintah, sedangkan 19.1% persen variasi kinerja Kualitas Laporan Keuangan Daerah dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen penelitian ini.

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-T)

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8.013	3.711		-2.159	.040
Sd	.608	.246	.340	2.470	.020
spi	.361	.082	.605	4.394	.000

a. Dependent Variable: kualitas2

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil Uji T diketahui bahwa variabel kompetensi SDM mempunyai nilai t-hitung 2,470 lebih besar dari t-tabel dan juga diperoleh nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,003 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara.

Hasil Uji T variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai nilai t hitung 4.394 lebih besar dari t-tabel dan juga diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$), disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tolikara.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Tabel 4.4
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	1639.201	2	819.600	57.069	.000
Residual	387.766	27	14.362		
Total	2026.967	29			

a. Dependent Variable: kualitas2

b. Predictors: (Constant), spi2, sdm2

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa F-hitung memiliki nilai 57.069 lebih besar dari nilai F-tabel, selain itu juga hasil ini didukung dengan nilai signifikansi hitung sebesar 0,000 ($p < 0.05$). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif secara simultan dan signifikan antara variabel Kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tolikara.

Pembahasan

Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil statistik menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini berarti semua aparatur yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pegawai dituntut untuk dapat memahami penyusunan laporan dengan menggunakan sisten dan prosedur yang telah ditetapkan, dan kurang memperhatikan latar belakang pendidikan pegawai.

SDM merupakan modal manusia (*human capital*) di dalam sebuah organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih

memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).

Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil statistik menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan telah diterapkannya unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah yang meliputi penguatan pengawasan, pemisahan tugas yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Jadi, untuk mencapai kualitas laporan keuangan daerah yang baik, seharusnya unsur-unsur tersebut juga berjalan dengan baik.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan Pemda Tolikara oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK memberikan opini “wajar dengan pengecualian” diantaranya disebabkan oleh masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Tolikara. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu variabel kompetensi SDM dan variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tolikara, dengan kuesioner valid dan reliabel sedangkan data yang dihasilkan memenuhi asumsi klasik secara keseluruhan memenuhi syarat dan dapat diterima.

Saran

Perlu orientasi dalam kerangka adanya kesepahaman bersama antara pengelola keuangan daerah untuk mampu meningkatkan kompetensi SDM bidang keuangan agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolikara agar kedepan dapat meningkatkan opini BPK dari WDP ke opini WTP.

Hendaknya Pemda Tolikara dapat terus melakukan perbaikan dalam hal penerapan system pengendalian intern yang lebih baik lagi dalam berbagai sector agar mendorong terwujudnya opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI

Keterbatasan penelitian ini adalah distribusi kuesioner saat responden sedang bekerja sehingga tingkat pengembalian kuesioner hanya 60%. Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode lain selain kuesioner, seperti wawancara langsung sehingga peneliti dapat lebih meyakini jawaban yang diberikan

responden untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu disarankan pula untuk memperluas variabel independen yang akan diteliti, misalnya komitmen organisasi, kepemimpinan dan kultur organisasi. Serta memperluas lingkup penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang organisasi sektor public.

Daftar Pustaka

- Adi Nugroho, 2011, Perancangan dan Implementasi istem Basis Data. Andi, Yogyakarta
- Afiah, Nunuy Nurdan Azwari, Peny Cahaya. 2015. The Effect Of The Implementation Of overnment Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance: A Research In District, City And Provincial Government In South Sumatera. Procedia– Social and Behavioral Sciences. Vol. 211: 811–818.
- Andini, F. 2015. Risk Factory of Low Back Pain in Workers. J Majority. Vol.4 No.1. Januari 2015
- Arens, A.A., Elder, R.J., and Beasley, M.S. 2012. Auditing and Assurance Service – An Intergated Approach, 14th Edition. Edinburg UK : Pearson Limited Education.
- Arens, Alvin. A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2010. Audit dan Jasa Assurance: Pendekatan Terpadu (Penerjemah Herman Wibowo). Jakarta: Salemba Empat
- Arfianty, Dita.2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arens,Alvin.A, Elder,Randal.J dan Beasley,Mark S. 2014. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*. Fifthen Edition. Pearson Education , Inc
- Azhar Susanto. (2008). Sistem Informasi Akuntansi-Struktur-Pengendalian-Resiko-Pengembangan. Cetakan Pertama. Bandung : Lingga Jaya
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Bagranof,NancyA • Simkin, MarkG. &Noman, Carolyn Strand. 2010.Coreconceptqfa OuntinginPmation 卅temS • 11m Edition • Johnwiley &sons, mC.
- BPK. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- COSO. 2013. Internal Control Integrated Framework. . New York: AICPA.
- Diwasya, Ina Rahmi. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Penelitian Pada SKPD di Kabupaten Labuhanbatu Utara).*Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Erlina dan Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. USU Press, Medan.
- Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Jurusan Akuntansi, *Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Medan.
- Ghozali, Imam, 2008. *Partial Least Squares Konsep Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS3.0 Untuk Penelitian Empiris*, Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin, 2004. *Manajemen*. Alih Bahasa Gina Gania. Penerbit Erlangga. Jakarta Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hirsch, Michaels, & Friedman, Perrow, 1987. *Dirty hand' versus Clean Model: Is Sociology in Danger Being Seduced by Economics*. Theory and Society 16(3) 317-336

- Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta. IAI.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. edisi 5. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Indriasari, Desi, dan Nahartyo, Dr.Ertambang, 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Sumber Daya Manusia*.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305-360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensen-meckling-76.pdf>.
- Kirana L.P.L, 2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. *Badan Perancangan Pembangunan Nasional*. Jakarta
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., & Terry D. Warfield. (2012). *Akuntansi Intermediete* (Terj. Emil Salim). Edisi 12, Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Kothari, C.R. 2004. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International (P) Ltd., Publishers.
- Lex Donaldson and James H. Davis, *Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns*, *Australian Journal of Management*, Vol. 16, page 49-64, 1 June 1991
- McLeod, R. dan Schell, G.P. 2007, *Management Information System* (edisi ke-10), Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Messier, William F., Glover, Steven M. dan Prawitt Douglas F. 2014. *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Sistematis*. Ed.8. Jakarta: Salemba Empat (buku dua)
- Nordiawan, D. (2012). *Anggaran Disuatu Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Tekhnologi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- Nugraha, Darya setya dan Apriyanti susanti. 2010. The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 2, h. 259-280
- Nuryanto, Muhammad, dan Nunuy Nur Afiah. 2013. The Impact of Apparatus Competence, Information echnology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province – Indonesia. *World Review of Business Research* Vol. 3. No. 4. November 2013 Issue. Pp. 157 – 171.
- Octarinda, Debi Ayu. 2016. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Pramudiarta, Rizal. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal). *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Prijono, Tjiptoherijanto. 2001. Kebijakan Upah: Tantangan Ditengah Krisis Ekonomi. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*. Volum 3 No.2.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Putriastri Pujanira dan Abdullah Taman, 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- _____, Peraturan Pemerintah PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- _____, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- _____, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____, Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Universitas Siliwangi*.
- Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2012. *Accounting Information System*, twelfth Edition. Prentice Hall.
- Roviyantie, Devi. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kabupaten Tasikmalaya). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Siliwangi
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sofyandi, Herman. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Spencer , Lyle M. and Signe M. Spencer. (1995). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley & Sons, Inc
- Sri Mulyani, NS. (2009). *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Abdi Sistematika.
- Stair, Ralph M. & George W. Reynolds. 2010. *Principles Of Information Systems*, Course Technology. 9th Editions. NY: Mc-Graw-Hill
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Universitas Muria Kudus. Kudus
- Udiyanti, Ni Luh Nyoman Ari, dkk. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng). *Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol. 2, No. 1
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna, dan Ni Kadek. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan*

Akuntansi Program SI, Vol. 2, No. 1.

- Wahana Komputer, 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta.
- Widyaningrum, Celviana, dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Kompensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Internal Akuntansi (Studi Empiris di Subosukawonosraten). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Yensi, Desi. Amir Hasan dan Y. Anisma. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Universitas Riau*.
- Yuliani, Safrida, Nadirsyah, Usman Bakar. 2013. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*. 3(2): 206-22